



Relokasi Terganjil Persoalan Kompensasi

Warga Lempuyangan Pertanyakan Dasar Perhitungan

YOGYA, TRIBUN - Warga RW 01 Tegal Lempuyangan, Yogyakarta, masih mempertanyakan kejelasan besaran kompensasi atas rencana pengosongan bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Warga membuka ruang dialog, dan berharap pertemuan dapat digelar dalam satu hingga dua hari ke depan.

Ketua RW 01, Anton Hadriutomo, menyatakan bahwa hingga Senin (26/5), warga belum menerima penjelasan resmi dari PT KAI terkait nilai kompensasi dan dasar penghitungannya. Warga pun berharap komunikasi antara ketiga pihak PT KAI, Keraton Yogyakarta, dan warga terdampak dapat segera difasilitasi.

Seperti diketahui, PT KAI Daop 6 telah mengirimkan surat pemberitahuan tentang pengosongan bangunan pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu.

Batas waktu yang diberikan adalah tujuh hari setelah surat diterima atau pada Rabu (28/5) besok.

"Mereka (PT KAI Daop 6)

BUKA RUANG DIALOG

- Warga RW 01 Tegal Lempuyangan, Yogyakarta, masih mempertanyakan kejelasan besaran kompensasi untuk relokasi.
- PT KAI berencana untuk melakukan pengosongan bangunan yang berdiri di atas lahan milik BUMN itu.
- PT KAI Daop 6 telah mengirimkan surat pemberitahuan tentang pengosongan bangunan pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu.
- Batas waktu yang diberikan adalah tujuh hari setelah surat diterima atau pada Rabu (28/5) besok.

kan sudah mengirimkan surat sejak satu minggu lalu dan kami masih menunggu respons, terutama dari Pak Langgeng (Perwakilan Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Keraton Ngayogyakarta) untuk menanyakan kompensasinya itu. Sebab selain mengirim surat, mereka juga ingin berbicara lagi, masih dibuka peluang untuk menjalin komunikasi. Sebab kan batas waktunya kan sampai Rabu," ujarnya, Senin (26/5).

Menurut Anton, kompensasi yang ditawarkan kepada warga berasal dari dua sumber. Dari PT KAI, kompensasi mencakup tiga komponen, yakni ganti rugi

atas bangunan tambahan di luar bangunan inti, uang rumah singgah sebesar Rp10 juta, serta biaya bongkar dan angkut sebesar Rp2,5 juta per rumah. Nilai kompensasi dari PT KAI sangat bervariasi karena dihitung berdasarkan ukuran bangunan tambahan masing-masing rumah.

Adapun dari pihak Keraton Yogyakarta, kompensasi diberikan dalam bentuk bebungah dengan nilai total sebesar Rp750 juta yang dibagikan kepada 14 rumah terdampak. "Kalau bebungah dari Keraton itu kami terima sebagai bentuk kerelaan dari Gusti. Tidak ada masalah. Tapi yang

jadi perhatian utama warga adalah kompensasi dari PT KAI," tegas Anton.

Adapun estimasi ongkos bongkar menyebutkan bahwa total luas bangunan yang akan dibongkar mencapai 5.271,29 meter persegi, terdiri atas 4.870,79 meter persegi bangunan semi permanen dan 400,5 meter persegi bangunan permanen.

Ongkos angkut untuk bangunan semi permanen dihitung sebesar Rp200.000 per meter persegi, sedangkan bangunan permanen sebesar Rp250.000 per meter persegi. Selain itu, tiap penghuni menerima tambahan Rp10 juta untuk rumah singgah dan Rp2,5 juta untuk biaya kuli dan truk pengangkut.

Dihitung kembali

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, merespons keberatan warga tersebut dengan menyebut bahwa tuntutan mereka patut diperhatikan, terutama mengenai bagian bangunan yang belum diperhitungkan dalam nilai kompensasi.

"Ra ngerti itu PT KAI og itu. Bukannya tidak selesai, sepertinya kemarin itu *ming pesangon*. Apa yang mereka bangun, yang tinggal di situ itu perlu juga diberi ganti rugi seperti itu. Kemarin kan tidak dihitung," ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (26/5).

Ia menjelaskan, sejumlah warga telah melakukan pembangunan tambahan pada hunian mereka, seperti kamar mandi atau ruang tambahan, yang sebelumnya tidak terakup dalam perhitungan. (han)

Bebungah dari Keraton Bentuk Empati

PEMERINTAH Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa bantuan berupa bebungah dari Keraton Yogyakarta kepada warga terdampak penataan Stasiun Lempuyangan tidak dapat disamakan dengan kompensasi resmi yang menjadi tanggung jawab PT KAI.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono, menyampaikan bahwa bebungah merupakan bentuk empati yang diberikan atas perintah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan tidak memiliki kaitan langsung dengan skema kompensasi yang seharusnya diberikan PT KAI kepada warga terdampak.

"Iya, bebungah itu berbeda dengan kompensasi dari PT KAI. Yang akan memanfaatkan kembali kawasan itu adalah PT KAI, maka Keraton mendorong agar diperhatikan betul mereka yang sudah lama menempati tempat tersebut," kata Beny saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (26/5).

Ia menambahkan, arahan dari Sri Sultan adalah agar semua hal yang belum menjadi kesepakatan dalam proses relokasi warga dapat ditinjau ulang. "Beliau kan ngendika, hal-hal yang belum menjadi kesepakatan dilihat kembali," lanjutnya. (han)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005